

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pemindahan dari salah satu lokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara political dan administratif. pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk mewujudkan *Good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang sentralistik, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketentuan dan bahkan menghilangkan ketentuan pemerintah di lembaga-lembaga/daerah tertentu kepada pemerintah pusat, serta mampu berkompetensi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan negara, yang dimulai dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan penganggaran. Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan anggaran dibahas mengenai perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan, serta berakhir dengan pertanggung jawaban hasil pengelolaan keuangan negara.

Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dalam pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan informasi atas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkannya.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menyediakan laporan relevan mengenai posisikeuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan dan memberikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam informasi keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektifitas dan efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, kedua, transparansi karena adanya standar,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengawasan Keuangan(BPK) menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku. dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, mampu mengendalikan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Tanpa ada standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bisa jadi berbeda-beda maka akan memunculkan persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu, pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) maka setiap penyajian laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung berupa infrastruktur, karena membantu dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Namun dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berjalan dengan semulus yang diharapkan. Salah satu kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah ataupun kualitas dari perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada salah satu penyusun laporan keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Dimana dalam penyajian laporan keuangan terdapat sedikit kendala yaitu tentang memahami dalam mengikuti perubahan peraturan menteri keuangan dalam penyajian laporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan.

Namun pada umumnya Bendara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara seperti melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja tertentu yang telah ditetapkan (pasal 1 angka 15 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara).

Berdasarkan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksud untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam undang-undang perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. (Muindro Renyowijoyo, 2013).

Berdasarkan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara(LKBUN) yang dijelaskan dalam pasal 6 yang mana dalam rangka penyusunan laporan keuangan, masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Menyampaikan laporan keuangan kepada Unit Akuntansi dan pelaporan keuangan di atasnya sesuai dengan jadwal. Laporan keuangan bendahara umum negara terdiri atas laporan Realisasi anggara (LRA), Laporan

operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam penyusunan laporan keuangan bendahara umum negara tingkat wilayah atau disebut dengan (LKBUN-W) dimana dalam CaLK (catatan atas laporan keuangan) tidak menjelaskan laporan perubahan ekuitas (LPE) dan laporan operasional (LO) karena pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi riau baru menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 jadi tidak ada perbandingannya pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014.

Namun, dalam Penyusunan Lapoan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tingkat wilayah atau disebut UAKBUN-Kanwil (Unit Akuntansi Keuangan Bendahara Umum Negara) berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dari laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya yaitu KPPN dumai, KPPN rengat, KPPN pekanbaru. Dalam penyusunannya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yaitu SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, kementerian negara/lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit eselon I di lingkungan kementerian keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan dan pelaksanaan Kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul

**“Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu:

Bagaimanakah Proses Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tingkat Wilayah dan apakah penyusunannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Untuk Mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tingkat wilayah dan mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan penelitian adalah:

- a. Bagi penulis dapat mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan dan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- b. Bagii pihak akademik, diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Bagi kantor wilayah ditjen perbendaharaan provinsi riau, diharapkan dapat memberikan masukann dan sumbangan pemikiran dalam menciptakan sitem yang lebih baik.

## D. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Peneliitian ini dilakukan di pekanbaru, dengan objek penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yang beralokasi di jln.Sudirman. Nomor 249.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa wawancara langsung dengan bagian pengawasan akuntansi pelaporan keuangan mengenai sistem informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah diolah dan disajikan oleh perusahaan yang terdiri dari dokumen pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan menteri keuangan, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah seperti bentuk file-file, atau modul dari kantor yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini.

**4. Analisis Data**

Analisis dan dilakukan dengan cara menghubungkan teori dan praktek yang ada yaitu dengan menggunakan metode deskriptif.

**E. Sistematika Penulisan**

Sebagai kerangka acuan untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulisan membaginya dalam 4 bab.



Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini mengrangi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metodologi penelitian dan sitematiika penulisan

### **BAB II Gambaran Umum Perusahaan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kantor, yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang atau *job description*.

### **BAB III Tinjauan Teori dan Praktek**

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori yang berisi definisi akuntansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah dan tinjauan praktek yang berisi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, dan jenis-jenis laporan keuangan serta penyusuna laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi Kantor Wilaya Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.